

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Partai Keadilan Sejahtera

Dalam Bab ini penulis akan menggambarkan secara singkat perihal profil Partai Keadilan Sejahtera yang diawali dengan merujuk pada sejarah kelahiran partai dengan menggunakan faktor internal dan faktor eksternal sebagai pisau analisis guna membangun logika historisitas kelahiran partai sebagai manifesto religio politis dari gerakan dakwah masa lalu. Analisis faktor eksternal menjadi penting posisinya dalam menjelaskan dan menggambarkan tentang pengaruh yang ditimbulkan terhadap semangat keberagaman umat Islam yang berada di Indonesia, dikarenakan semangat itu muncul seiring dari adanya pergerakan umat Islam yang berada didataran Timur Tengah. Kebangkitan kembali semangat keberagaman yang terjadi di Timur Tengah diyakini, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai salah satu embrio dari meningkatnya semangat keberagaman umat Islam yang berada di Indonesia, terlebih lagi adanya adagium “Timur Tengah sebagai pusat grafitasi religius umat Islam di seluruh dunia” menjadi bukti afirmatif fenomena keterkaitan tersebut.

Pada bagian selanjutnya, penulis akan menggambarkan perihal struktur organisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sistem kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera dan sekilas tentang platform Partai Keadilan Sejahtera serta diakhiri dengan pemilihan umum yang diikuti oleh Partai Keadilan yang kemudian pada tahun 2002

bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera akibat terganjal oleh ambang batas parlemen (*Parlementary Thereshold*). Hal ini dilakukan oleh penulis sebagai upaya pengayaan profil kepartaian dan sekaligus sebagai alat analisis guna membaca dan memahami ruang gerak partai dalam mengarungi belantar politik nasional.

1. Sejarah Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera

Semangat revivalisme keagamaan yang terjadi pada tahun 1980-an ditenggrai oleh sebagian besar para ilmuan sebagai salah satu efek domino dari menguatnya dimensi spiritualisme umat islam dalam menjalankan ritual keberagamaan, hal ini terjadi bukan tanpa sebab, karena jika dilihat dalam kaca mata sejarah, geliat kebangkitan umat islam di Indonesia memiliki hubungan kausalitas dengan menjamurnya semangat revivalisme yang terjadi didaerah Timur Tengah. Pantulan cahaya ideologis Timur Tengah telah masuk ke Indonesia dengan berbagai bentuk varian pemahaman yang berbeda, walaupun berasal dari sumber yang sama yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Jika dilihat secara seksama, semangat revivalisme yang terjadi di Indonesia secara kebetulan bersamaan dengan menguatnya hubungan antara umat Islam di berbagai Negara Arab serta berimbas pada berkecamuknya ketegangan fisik diantara negri-negri muslim dengan negri non-muslim. Hal ini terlihat ketika terjadi Perang Yom Kippur atau Perang Pemadhen dimana negara-negara arab menghimpun diri

untuk melawan Israel yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah pada tahun 1973⁶⁰, kemudian bersamaan dengan itu terjadi embargo minyak dari negara-negara arab kepada negara Amerika Serikat, Inggris serta Israel yang dipimpin oleh Raja Faisal pada tahun 1973 sebagai bukti keberpihakannya kepada Mesir dan Syiria dalam melakukan serangan terhadap Israel⁶¹, dimulainya jihad di Afganistan pada tahun 1979⁶², hingga berkuasanya Imam Khomeini lewat revolusi Iran pada akhir 1970-an yang dianggap sebagai “kebangunan” islam⁶³.

Perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh negara-negara timur tengah tersebut membawa dampak pada menguatnya persaudaraan umat Muslim se-dunia yang tentunya berdasarkan pada kesamaan perasaan keagamaan yang sudah lama terjajah, baik secara fisik, psikis maupun melalui despotiknya rezim yang berkuasa di dalam suatu negara. Pengaruh tersebut merupakan bagian dari kepercayaan umat islam bahwa negara Arab merupakan -meminjam istilah Abdurahman Wahid- “pusat grafitasi religious”, sehingga umat muslim yang berada di wilayah *periphery* (dalam terminologi keagamaan) harus bangkit dengan membawa panji persamaan keyakinan dalam setiap aspek perlawanan yang dilakukannya.

⁶⁰Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Yom_Kippur yang diakses pada tanggal 11 Februari 2013

⁶¹Lihat <http://saudi-tauhid-sunnah.blogspot.com> yang diakses pada tanggal 11 Februari 2013

⁶²Lihat <http://indrasr.multiply.com/journal/item/165/Lintasan-Sejarah-Jihad-Afghan> yang diakses pada tanggal 11 Februari 2013

⁶³Lihat Olaf. H. Schumann “*Dialog Antar Umat Beragama, Membuka Babak Baru Hubungan Antar Umat Beragama, Sebuah Dokumentasi*”, PT BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2008 Hal 153.

Keterangan : Revolusi Iran yang terjadi pada tahun 1970-an dianggap oleh kelompok Sunni sebagai

Pengaruh Islam yang bersumber dari Timur Tengah bukanlah sesuatu hal yang baru dalam sejarah, semenjak Islam masuk ke nusantara, hubungan masyarakat Indonesia dengan Timur Tengah sangat kental. Dalam konteks keagamaan, pengetahuan dan politik, transmisi ini dimungkinkan, karena posisi Timur Tengah sebagai sentrum yang selalu dijadikan sebagai rujukan umat islam⁶⁴. Sangat pentingnya hubungan antara Muslim Indonesia dengan Timur Tengah terlihat dari banyaknya umat Islam Indonesia yang menimba ilmu diberbagai universitas yang berada disana, sembari tentunya mengenakan rukun Islam yang terakhir. Hal ini terlihat ketika banyak dari pelajar-pelajar Indonesia yang pulang selain membawa title Lc juga membawa title keagamaan, yaitu Haji untuk ikhwan dan Hajjah untuk akhwat.

Transmisi ideologis ini bermula dari pengiriman para pelajar Indonesia ke Timur Tengah yang diawali dari adanya hubungan yang terjalin antara Dewan Dak'wah Islam Indonesia (DDII) yang dipelopori oleh M. Natsir dengan *Rabithah Al-alam Al-Islami* (Liga dunia Islam)⁶⁵. Organisasi ini diprakarsasi oleh Raja Faisal dengan meluaskan kegiatan-kegiatan keagamaan di dunia Islam dalam penerbitan, membiayai proyek-proyek, mengorganisasi konferensi-konferensi, membangun mesjid dan sekolah dan lain sebagainya⁶⁶. Disinilah peran DDII sebagai organisasi yang mampu menghubungkan pelajar Indonesia dengan organisasi yang berada di

⁶⁴ Lihat M. Imadadun Rahmat "Arus Baru Radikal Islam, Transmisi Islam Timur Tengah ke Indonesia", Erlangga, Jakarta, 2007 Hal xii

⁶⁵ Lihat 'Opit Burhanuddin Muhtadi "Dilema PKS Suara dan Syariah" Hal 38

⁶⁶ Lihat 'Opit Burhanuddin Muhtadi "Dilema PKS Suara dan Syariah" Hal 38

Timur Tengah, yang kemudian pada tahun-tahun berikutnya para pelajar ini menjadi tokoh sentral dalam menyuntikan semangat revivalisme keagamaan dengan merujuk pada pergolakan Islam di Timur Tengah.

Menurut M.Imadadun Rahmat⁶⁷, ada beberapa peran penting DDII yang sangat menentukan proses transmisi ini, *Pertama* DDII menjadi lembaga Islam pertama yang mengusahakan secara serius dan terorganisasi pengiriman mahasiswa ke timur tengah. *Kedua* DDII dan M. Natsir menjadi penggagas serta mediator Lembaga Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) yang merupakan cabang dari Universitas Muhammad Ibnu Saud di Riyadh. *Ketiga* DDII pulalah yang meletakkan landasan awal gerakan dak'wah kampus (jaringan lembaga dak'wah kampus) dengan program Latihan Mujahid Dak'wah di mesjid salman ITB. *Keempat* DDII juga berperan secara tidak langsung dalam mendorong penerjemahan karya-karya dan pemikir utama gerakan revivalisme islam timur tengah ke dalam bahasa Indonesia, seperti Hasan Al-Banna, Sayid Qutb, Abu A'la Maududi dan Yusuf al-Qardhawi. Pengembangan dakwah di kampus ini pada akhirnya menjadi cikal bakal dari gerakan Islam di Indonesia yang diperankan oleh Hizbut Tahrir, Gerakan Tarbiyah dan Dakwah Salafi.

Kemunculan DDII diberbagai kampus yang bernuansa sekuler seperti ITB, IPB dan lain sebagainya, merupakan reaksi yang ditunjukkan oleh mahasiswa terhadap

⁶⁷ Ibid., (Timadadun Rahmat, "M. Natsir dan PKG: Peran M. Natsir dalam Gerakan Revivalisme"

ketidakramahan dan tindakan refresif rezim Soeharto pada saat itu, terutama terhadap kelompok “islam politik”, hal ini terlihat ketika Soeharto enggan merehabilitasi partai Masyumi yang sebelumnya dibubarkan oleh Soekarno dengan tuduhan yang tidak *fair*, alasan pembubaran Masyumi dikarenakan pemimpin-pemimpin itu terlibat dalam pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), padahal ketika terlibat dalam pemberontakan, mereka (Natsir, Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap) tidak lagi menjadi pemimpin formal Masyumi⁶⁸. Pembubaran yang dilakukan oleh Soekarno kemudian terejawantah dalam Keppres No. 200 tahun 1960⁶⁹, dan sudah barang tentu hal ini menguntungkan PKI karena Masyumi –selain PSI- merupakan lawan politik yang tangguh⁷⁰.

Ketidakadilan yang diperlihatkan oleh Soekarno dengan membubarkan Partai Masyumi tidak membuat Soeharto merehabilitasi Masyumi, bahkan Pemerintah (Soeharto) memveto kemunculan kembali para pemimpin Masyumi yang moderat dalam kancah politik, karena khawatir akan kesanggupan mereka memobilisasi umat untuk mengembalikan percaturan politik liberal pra-demokrasi terpimpin, yang dianggap merupakan angan-angan Masyumi⁷¹. Setelah dibubarkannya Masyumi, pemerintah menggantinya dengan melegalkan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang tentunya pemerintah kembali mencegah eks-Masyumi untuk menjadi pejabat

⁶⁸Lihat Moh. Mahfud MD “*Politik Hukum di Indonesia*”, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006 Hal 144

⁶⁹Lihat Keppres No 200 Tahun 1960

⁷⁰Lihat Samsudin “*Mengapa G 30 S/PKI Gagal? (Suatu Analisis)*”, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005 Hal XVI

⁷¹Lihat Samsudin “*Mengapa G 30 S/PKI Gagal? (Suatu Analisis)*”, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005 Hal 128-129

pusat maupun daerah dalam tubuh kepartaian serta menjegal pencalonan eks-Masyumi dalam pemilihan umum.

Antagonisme politik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap umat islam tidak hanya sampai disitu, pemerintah kemudian mengebiri hak-hak politik keagamaan dengan cara membuat kebijakan yang kontraproduktif dengan kepentingan umat islam secara keseluruhan, seperti larangan pemakaian jilbab-jilbab disekolah, penghapusan libur pada bulan Ramadhan, sensor terhadap naskah khutbah Iedul Fitri dan Iedul Adha, gagasan P-4 pada pemilu 1977 yang kemudian gagasan ini ditindaklanjuti di dalam SU MPR tahun 1978⁷², mengganti pelajaran agama dengan pendidikan moral pancasila (PMP) dalam semua tingkatan sekolah, penurunan anggaran belanja negara 1973/1974 untuk urusan-urusan keagamaan, persoalan aliran kepercayaan yang kedudukannya setingkat dengan agama lain⁷³, asas tunggal Pancasila untuk Partai Politik dan Golongan Karya yang termaktub dalam UU No. 3 Tahun 1985⁷⁴ yang kemudian menjalar kepada organisasi masyarakat dengan dikeluarkannya UU No. 8 Tahun 1985⁷⁵ dan lain sebagainya. Pendeknya,

⁷²Lihat Abdul Aziz Thaba "Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru", Gema Insani Press, Jakarta, 1996 Hal 23-26

⁷³ Lihat Ali Maschsan Moesa "Nasionalisme Kiai, Konstruksi Sosial Berbasis Agama", LKIS Yogyakarta, Yogyakarta, 2007 Hal 122

⁷⁴Lihat UU No. 3 Tahun 1985 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya

⁷⁵UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

sebagaimana yang pernah dikatakan oleh sementara pengamat politik, politik Islam secara konstitusional, fisik, elektoral, birokratik dan simbolik telah terkalahkan⁷⁶.

Ketegangan politik antara Islam disatu sisi dan Negara disisi yang lain terjadi terutama pada zaman Soeharto, pada periode ini umat Islam kehilangan elan vital kekuatan politiknya akibat dari despotisme rezim yang berkuasa. Umat Islam yang semula gigih memperjuangkan semangat "islam politik" kini telah kehilangan makna perjuangannya. Praktis, ketika kondisi sosial dan politik tidak kondusif, Umat Islam kembali ke barak mesjid sebagai tempat peraduan terakhir guna melawan rezim yang sedang berkuasa, dan pembentukan DDII merupakan bentuk perlawanan religio politis yang pada akhirnya menampakan diri sebagai kekuatan yang terlahir kembali mengisi diskursus islam dan politik di Indonesia.

Sebenarnya, jauh sebelum adanya keterkaitan antara DDII dengan *Rabithah Al-alam Al-Islami* (Liga dunia Islam) pada tahun 1980-an, pemahaman keagamaan di tengah mahasiswa telah memuncak, setidaknya hal ini terlihat dari riak-riak keagamaan yang terjadi diberbagai kampus. Dalam kasus pertumbuhan di ITB misalnya, kelompok santri yang menjadi perintis awal keislaman di kampus seperti Ir. TM Soelaiman yang merupakan anak seorang ulama dari Banten, Prof Drs. Ahmad Sadali dan adiknya Ir. Nukman adalah anak dari Haji yang menjadi pengusaha dari

⁷⁶ Lihat Rakhier Efendi, "Teorasi Baru Politik Islam, Bertautan Agama, Negara, dan Demokrasi?"

Garut, mendesak agar Rektor ITB saat itu untuk membangun sebuah mesjid yang kemudian dikenal dengan nama mesjid salman ITB.

Pada perkembangan berikutnya, terdapat tokoh sentral dalam membangun semangat keberagaman pada tahun 70-an dan 80-an, beliau adalah Ir. Imaduddin Abdul Rahim, M.Sc yang merupakan anak seorang ulama dari Sumatra Utara, yang kemudian menggagas konsep pengajian keislaman di mesjid Salman ITB bahkan konsep pengajian ini berkembang diseluruh mesjid kampus yang berada di Indonesia.

Setelah tidak lagi menjabat sebagai ketua umum pengurus Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI) yang merupakan organisasi otonom dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), beliau kemudian mendirikan Latihan Mujahid Dakwah (LMD) pada tahun 1974⁷⁷, yang sebenarnya merupakan realisasi dari usaha DDII untuk menjadikan kampus sebagai sasaran dakwah.

Latihan Mujahid Dak'wah (LMD) ini pada prinsipnya mengajarkan totalitas pandangan keislaman yang tidak memisahkan antara satu aspek dengan aspek yang lainnya. Islam tidak dilihat dalam kacamata perbedaan antara yang sakral dan profan. Imaduddin mengajak kepada para mahasiswa yang dikadernya untuk mewujudkan islam itu secara nyata dalam kehidupan nyata.

Di samping hal itu, gagasan yang diajarkan oleh Imaduddin ini sekaligus sebagai *counter issue* terhadap ide sekularisasi yang pada 70-an digemakan oleh

Tak kurang dari Dr. M. Kamal Hasan sendiri mencap Nurkholis Madjid sebagai seorang sekularis, dan kemudian ketidaksepemahaman ini yang menjadi salah satu alasan dari berbagai alasan munculnya Latihan Mujahid Dakwah (LMD) yang digagas oleh Imaduddin, karena bagi dirinya islam sebagai sebuah ajaran yang *kaffah* (menyeluruh) dan lengkap, hal inilah yang kemudian disebarakan dalam berbagai latihan di mesjid Salman ITB⁸⁰.

Melalui berbagai kegiatan LMD, persentuhan awal para aktivis dakwah kampus dengan pemikiran Ikhwanul Muslimin terjadi. Melalui Imaduddin mereka berkenalan dengan pokok-pokok pemikiran Ikhwanul Muslimin dan manhaj dakwah organisasi yang lahir di Mesir ini. Imaduddin sendiri bersentuhan dengan pemikiran Ikhwanul Muslimun ketika ia menjadi bagian dari jaringan aktivis islam internasional. Dalam kapasitasnya sebagai ketua umum PB LDMI, Imaduddin terpilih sebagai Sekrtaris Jendral IIFSO (*International Islamic Federation of Student Organisation*), yang mengantarkannya berkenalan dengan tokoh-tokoh dan pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimun, yang pada saat itu pengaruhnya demikian kuat di dunia islam⁸¹.

⁸⁰ Lihat 'Opcit Ali Said Damanik "Fenomena Partai Keadilan Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia" Hal 71

⁸¹ Lihat 'Opcit M. Imaduddin Rahmat "Arahan Baru Radikal Islam, Transmisi Islam Timur Tengah ke

Bersamaan dengan digalakkannya kegiatan LMD, Imaduddin pun memperkenalkan sistem "Usrah"⁸². Identifikasi yang dekat, barangkali dengan mengaitkannya dengan sistem kaderisasi Ikwanul Muslimun dimana Imaduddin mengalami persentuhan yang intensif dalam pemikiran gerakannya, sepanjang tahun 70-an usrah juga menjadi sistem kaderisasi yang dilakukan oleh ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) pimpinan Anwar Ibrahim pada tahun 1970-an⁸³. Akan tetapi jika merujuk kepada sejarah, selain di gunakan oleh Ikhwanul muslimin sebagai sistem kaderisasi, kata "usrah" sendiri lebih dahulu digunakan oleh ABIM ketimbang dengan LMD buatan Imaduddin, dikarenakan pemikiran Ikhwanul Muslimin pertama kali masuk ke Malaysia dan selanjutnya menyebar ke berbagai negara yang berada di Asia Tenggara termasuk di dalamnya negara Indonesia. Sebagaimana penuturan mantan Sekertaris Jendral Maktab Asia dan Fasifik Ikhwanul Muslimin:

"Jadi IM itu masuk ke Malaysia lebih dahulu ketimbang masuk ke Indonesia, IM Malaysia dipimpin oleh Urwah dan Dahlan mempengaruhi kegiatan aktivitas di Malaysia dan memasyarakatlah istilah usrah, kemudian ABIM yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim terpengaruh istilah tersebut, maka mendominasi istilah usrah di ABIM seolah-olah istilah itu milik ABIM, dan Imaduddin memiliki hubungan dekat dengan Anwar Ibrahim, nah Anwar Ibrahim dan Imaduddin itu ada dibawah bimbingan M.Natsir"⁸⁴.

Kata usrah ini kemudian mengalami pembusukan makna dan berubah menjadi Tarbiyah, setidaknya perubahan kata ini disebabkan oleh 2 hal, yaitu:

⁸²Lihat 'Opcit Ali Said Damanik "Fenomena Partai Keadilan Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia" Hal 71

⁸³Lihat 'Ibid Ali Said Damanik "Fenomena Partai Keadilan Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia" Hal 72

⁸⁴Lihat 'Ibid Ali Said Damanik "Fenomena Partai Keadilan Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia" Hal 72

Pertama, kata usrah yang digunakan oleh aktivis mesjid ini sama dengan yang digunakan oleh Komando Jihad yang dipimpin oleh Imran. Pada saat itu istilah usrah digunakan oleh komando Jihad guna mengidentifikasi anggota/aktivis yang terkumpul dalam gerakan komando jihad⁸⁵.

Kedua, kata usrah ini dinilai oleh pemerintah mengandung arti subversif dikarenakan kerahasiaan dan eksklusifitasnya, sehingga pada saat itu media massa yang berada di bawah bimbingan pemerintah melakukan propaganda dengan menyatakan kelompok usrah sebagai gerakan sempalan umat islam⁸⁶.

Propaganda yang dilakukan oleh media massa pada saat itu didasari atas penangkapan terhadap sejumlah orang yang diidentifikasi sebagai anggota Komando Jihad. Dalam catatan Pangkowlham II pada tahun 1976 telah ditahan 306 orang dan 175 diantaranya sudah dibebaskan. Data yang disediakan oleh Ken Konboy menyebutkan pada januari 1977, atau empat bulan sebelum pemilu digelar aparat keamanan melakukan penangkapan hingga mencapai 185 orang. Dari jumlah 306 sebanyak 51 orang diteruskan perkaranya ke pengadilan dan 80 orang lainnya dalam proses hukum. Data lain jumlahnya diperkirakan lebih dari 200 orang ditangkap sejak akhir 1980-an hingga pertengahan 1981, dan dari jumlah tersebut hanya 30 orang saja yang dilanjutkan ke persidangan, selebihnya dibebaskan bersyarat oleh opus

⁸⁵ Lihat 'Opcit Ali Said Damanik "Fenomena Partai Keadilan Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia" Hal 72

⁸⁶ Lihat Muhammad Hisyam "Prosiding Muncul & Berkembangnya Varian Keagamaan Islam Kontemporer di Indonesia: Islam, Negara Bangsa, dan Globalisasi", Pusat Penelitian Kemasarakatan dan Kebudayaan LIPI Jakarta 2008 Hal 43

termasuk beberapa nama yang menjadi tokoh Komando KW-9, kecuali nama tokoh, yaitu Menlu Neo NII yang bernama Hilmi Aminuddin bin Danu Muhammad Hasan⁸⁷ yang sekarang menjadi Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seumur hidup.

Penangkapan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap beberapa orang yang terhimpun dalam komando jihad ini, dikarenakan:

1. Kepentingan Soeharto untuk memenangkan Golkar dalam pemilu tahun 1977, ada kekhawatiran suara masa Islam beralih ke PPP dan Golkar ditinggalkan.
2. Kepentingan pribadi Ali Moertopo karena benci terhadap gerakan Islam.
3. Membantu melanggengkan kekuasaan Soeharto dengan harapan suatu saat nanti Ali Moertopo menjadi Wakil Presiden⁸⁸.

Pada saat itu Hilmi Aminuddin bin Danu Muhammad Hasan mendapatkan Penahanan tanpa persidangan selama 3 tahun dalam Operasi Khusus (opsus), hal ini terjadi dikarenakan Hilmi dan Ayahnya merupakan binaan BAKIN. Hal ini bermula pada tahun 1971, pada saat itu Presiden Soeharto diduga menugaskan Jendral Ali Moertopo untuk mengendalikan manuver pergerakan NII. Kemudian Jendral Ali Moertopo memerintahkan Pitut Soeharto untuk melaksanakan tugas tersebut,

⁸⁷Lihat Busyro Muqoddas "Hegemoni Rezim Intelejen, Sisi Gelap Peradilan Kasus Komando Jihad", PUSHAM UII, Yogyakarta, 2011 Hal 11

⁸⁸...

akhirnya terjadilah pertemuan sejumlah anggota NII di rumah Danu Muhammad Hasan yang terletak di Jalan Situ Aksan, Bandung Jawa-Barat. Akibat dari pertemuan itu, terjadilah perpecahan dikalangan NII, yakni kubu NII Fillah dan kubu NII Sabilillah. Kubu NII Fillah adalah kubu yang menyetujui dan mendapatkan amnesti dari Soeharto, sedangkan NII Sabilillah adalah kelompok yang tidak setuju dan menolak amnesti dari Soeharto. NII Fillah masuk dan mendukung Partai Golkar pimpinan Soeharto, namun tidak menjadi anggota legislatif sedangkan sejumlah NII Sabilillah ditangkap dan dipenjarakan⁸⁹ dalam Operasi Khusus pada tahun 1971-1975, sedangkan Danu Muhammad Hasan disembunyikan oleh Ali Moertopo untuk membantu BAKIN⁹⁰.

Pada tahun 1973 Hilmi Aminuddin atas bantuan Ali Moertopo dan Pitut Soeharto melanjutkan studi di Fakultas Syariah Universitas Madinah, Saudi Arabia untuk mempelajari dan mengadopsi ajaran dan manhaj serta berhubungan langsung secara organisasional dengan gerakan Ikhwanul Muslimin Faksi Qiyadah Syaikh Sa'id Hawwa pimpinan Ikwanul Muslimin cabang Suriah⁹¹. Selain dari pada itu, bantuan yang diberikan kepada Hilmi Aminuddin untuk melanjutkan studi ke Arab Saudi ini merupakan salah satu bentuk strategi guna memanfaatkan kelompok-kelompok dakwah untuk kepentingan rezim, dengan tujuan agar membentuk jaringan organisasi radikal Islam baru dikalangan remaja mesjid dan gerakan kampus yang

⁸⁹Catatan Pribadi Yusuf Supendi Yang Diberikan Kepada Penulis Tanggal 23 Maret 2013

⁹⁰Lihat Majalah Detik "Hilmi Aminuddin The Godfather" Edisi 65, 25 Februari-3 Maret 2013

⁹¹Lihat "Oasis Pemuda Merdeka" "Hegemoni Binu Ijtihad: Sisi Gelap Peradaban Kasus Komando

berada di bawah binaan dan pengawasan intelejen⁹². Selanjutnya, sekitar tahun 1978 ketika Hilmi lulus kuliah dan pulang ke Indonesia⁹³, Hilmi Aminuddin di jemput oleh Soeripto di bandara dan atas jasa Soeripto pulalah buku-buku Islam yang dibawa oleh Hilmi lolos dari sensor ketat rezim orde baru pada masa itu⁹⁴. Ketika datang ke Indonesia, Hilmi bekerja di Atase Agama Kedutaan Saudi Arabia sebagai da'i (juru dakwah)⁹⁵, akan tetapi dikarenakan terjadi penahanan tanpa persidangan pada tahun 1981-1983 seperti yang telah penulis paparkan di atas, akhirnya tunjangan da'i tersebut diputus oleh Kerajaan Arab Saudi. Dan setelah keluar dari tahanan, Hilmi Aminuddin kembali bekerja di Atase Agama Kedutaan Saudi Arabia, akhirnya sekitar tahun 1990-an beliau mengundurkan diri dari Atase Agama Kedutaan Saudi Arabia⁹⁶

Pada saat Hilmi berada di Indonesia dan bekerja sebagai da'i, Soeripto sering mengikuti pengajian Hilmi Aminuddin, sehingga ada kedekatan antara Hilmi Aminuddin dan Soeripto. Kedekatan yang terjalin antara Hilmi dan Soeripto ini sebenarnya merupakan bentuk lanjutan dari strategi intelejen guna memonitor kinerja Hilmi Aminuddin, dikarenakan seperti yang sudah kita ketahui, Soeripto pada tahun 1967 pernah bergabung dengan Kodam Siliwangi sebagai kader Militer Sukarela dibawah pembinaan Kharis Shuhud. Soeripto kemudian menjadi intel binaan Pangkowilhan dari wijoyo Suyono, Soerono hingga Wahono, dan secara struktur di

⁹²Lihat 'Ibid Busyro Muqoddas "Hegemoni Rezim Intelejen, Sisi Gelap Peradilan Kasus Komando Jihad" Hal 398

⁹³Lihat <http://profil.merdeka.com/indonesia/h/hilmi-aminuddin/> yang diakses pada tanggal 6 April 2013

⁹⁴Lihat Majalah Tempo "Main Daging Pentolan PKS" Edisi 14-20 Maret 2011 Hal 92

⁹⁵Catatan Pribadi Yusuf Supendi Yang Diberikan Kepada Penulis Tanggal 23 Maret 2013

⁹⁶Catatan Pribadi Yusuf Supendi Yang Diberikan Kepada Penulis Tanggal 23 Maret 2013

bawah komando Yoga Sugama di BAKIN yang waktu itu dipimpin oleh Sutopo Juwono. Sempat menduduki jabatan sebagai Kepala Staff BAKIN dan Sekretaris Lembaga Studi Strategis/Wanhanakamnas dan menjadi utusan khusus Pemerintah RI untuk normalisasi hubungan dengan RRC pada tahun 1981, dan pada tahun 1986-2000 BAKIN menugaskan Soeripto sebagai Ketua Tim Penanganan Masalah Khusus Kemahasiswaan DIKTI/Depdikbud, dengan misi utama membentuk jaringan organisasi radikal islam baru dikalangan remaja mesjid dan gerakan kampus yang berada di bawah binaan dan pengawasan intelejen⁹⁷.

Selanjutnya, Pada tanggal 11 September 1983 Hilmi Aminuddin bersama dengan Salim Asegaf Al Jufri, Abdullah Said Baharmus dan H. Acep Abdussakur mendirikan Jamaah Ikhwanul Muslimin (JIM) di Indonesia sebagai cabang atau kepanjangan tangan dari Ikhwanul Muslimin di Mesir⁹⁸. Ketika awal berdiri JIM di Indonesia, Salim Segaf Al Jufri menduduki jabatan sebagai *Muraqib Amm* atau pemimpin tertinggi JIM di Indonesia⁹⁹. Akan tetapi, keberadaan JIM ini tidak pernah dipublikasikan bahkan ditutupi, dikarenakan dalam gerakan Ikhwanul Muslimin terdapat kaidah "*Zahriatul Da'wah Wa Syiriatu Tanjhim*" artinya Dakwah Terbuka, Pengelolaan Tertutup¹⁰⁰, setidaknya kaidah inilah yang dijadikan sebagai pegangan dan salah satu alasan dari berbagai alasan ketertutupan keberadaan JIM di Indonesia.

⁹⁷Lihat 'Opcit Busyro Muqoddas "*Hegemoni Rezim Intelejen, Sisi Gelap Peradilan Kasus Komando Jihad*" Hal 397-398

⁹⁸Catatan Pribadi Yusuf Supendi Yang Diberikan Kepada Penulis Tanggal 23 Maret 2013

⁹⁹Lihat 'Opcit Busyro Muqoddas "*Hegemoni Rezim Intelejen, Sisi Gelap Peradilan Kasus Komando Jihad*" Hal 105

¹⁰⁰Facil Wawancara Dengan Kader Senior Gerakan PKS di Jakarta Pada Tanggal 26 Januari 2012

Selanjutnya Hilmi Aminuddin keluar dari Atase Kedutaan Arab Saudi agar Hilmi lebih fokus pada dakwah Ikhwanul Muslimin di Indonesia, terlebih lagi ketika Hilmi Aminuddin menggantikan Salim Segaf Al Jufri sebagai *Muraqib Amm* JIM di Indonesia¹⁰¹.

Pekerjaan Hilmi sebagai juru dakwah inilah yang menyebabkan Hilmi mudah masuk ke berbagai organisasi dan aktivitas yang berada di mesjid. Hal inilah yang kemudian dipergunakan oleh Hilmi guna melancarkan strategi yang sudah direncanakan semenjak Hilmi melanjutkan studi ke Arab Saudi, yaitu untuk mengkooptasi gerakan-gerakan surau yang pada saat itu sedang digandrungi oleh aktivis mahasiswa, termasuk didalamnya gerakan yang didirikan oleh Imaduddin.

Disamping itu, pada tahun 1980-an Dakwah Kampus kemudian dijadikan UKM resmi dengan nama Lembaga Dakwah Kampus (LDK), guna memperluas jaringan dakwah maka dibentuklah Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) pada tahun 1986, ketika FSLDK mengadakan pertemuan di Malang maka dibentuklah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), walaupun tidak semua peserta FSLDK sepatutnya dengan pembentukan tersebut, organisasi ini tetaplah berdiri. Perubahan demi perubahan yang dilakukan oleh aktivis mesjid dengan membuat organisasi formal ini setidaknya bisa dianalisis dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu perkembangan yang terjadi dalam internal mereka sendiri dan kedua faktor eksternal dimana kondisi sosio politik yang

¹⁰¹ G. M. H. Hilmi, *Memorandum Hilmi Aminuddin Kepada Rombongan Pada Tanggal 22 Maret 2012*

berkembang ditengah masyarakat yang memungkinkan terjadi transformasi menjadi organisasi formil¹⁰².

Bentuk transformasi terakhir yang dilakukan oleh gerakan dakwah ini adalah dengan mendirikan PK pada tahun 1999¹⁰³ yang kemudian berubah menjadi PKS pada tahun 2002¹⁰⁴. Transformasi yang dilakukan oleh PK menjadi PKS merupakan upaya taktik strategis yang dilakukan oleh partai dikarenakan tersandung ambang batas parlemen (*parlementary threshold*) yang pada saat itu tidak mencapai 2,5%. ketersandungan partai ini dianggap oleh sebagian orang sebagai bukti kekakuan partai dalam mengarungi belantara politik nasional yang dari sejak kemunculannya hanya terpaku pada golongan islam fundamentalis.

Kekakuan gerakan dalam memperbesar ceruk pasar pemilih ini memiliki hubungan kausalitas dengan garis ideologis yang menjadi sumber rujukan dalam melakukan kegiatan politik, seperti yang sudah kita ketahui PKS merupakan kepanjangan tangan dari gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, sehingga gerakan politik PKS lebih mengarah pada golongan islam fundamentalis, walaupun kemudian keterkaitan antara PKS dan Ikhwanul Muslimin secara organisatoris ini disangsikan oleh beberapa petinggi yang berada di partai, sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdullah Said Baharmus, beliau mengatakan:

¹⁰² Lihat 'Op cit Ali Said Damanik "Fenomena Partai Keadilan Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia" Hal 36

¹⁰³ Deklarasi Pendirian Partai Keadilan Terlampir

¹⁰⁴ Deklarasi Pendirian Partai Keadilan Sejahtera Terlampir

“Yang saya tahu tidak ada, klo sejarah berdirinya itu kan sudah ada di berkas di DPP, klo itu kata Yusuf Supendi, suruh saja Yusuf Supendi membuktikan, yang ada di kita itu Majelis Syura, semua itu harus ada hitam putihnya, jangan cuman katanya”¹⁰⁵.

Akan tetapi, sangkalan yang dinyatakan oleh Abdullah Said Baharmus ini dibantah oleh petinggi partai yang berada di daerah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Salihul Fajri:

“Itu yang saya bilang, tidak ada yang mau mengakui, kecuali orang Ikhwan yang dari dalam terus keluar lalu mengaku, iya kan Ikhwan itu janjinya tidak boleh ngebocorin ke orang. Mereka dirikan atau tidak ya mereka tutup, itu kan rahasia mereka, jadi di depan PKS di dalamnya Ikhwan, namun kemudian membusukan ikhwan itu sendiri dengan manufer-manufer mereka, makanya ikhwan yang masih murni keluar”¹⁰⁶.

Sinyalemen keterkaitan antara partai dengan gerakan islam transnasional yang bernama Ikwanul Muslimin terlihat secara jelas ketika Hilmi Aminuddin mendirikan JIM Indonesia pada tahun 1983 sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam penjelasan sebelumnya, di samping itu keterkaitan ini dapat terlihat pula dari surat-surat yang ditujukan kepada *Mursyid Amm* yang berada di Mesir¹⁰⁷. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Salihul Fajri, beliau mengatakan:

“Kita melihat dari pengakuan dari IM sendiri yang kemudian struktur di dalam PKS sendiri mengacu kepada Ikhwan, namun mereka tidak berani menyatakan dirinya Ikhwan tapi membuat PKS namanya”¹⁰⁸.

Justifikasi PKS sebagai kepanjangan tangan dari Ikwanul Muslimin di Mesir ini pun dapat terlihat pula dari budaya organisasi yang terbentuk diinternal partai, dari mulai sumber bacaan kader yang sangat kental dengan gerakan Ikwanul Muslimin,

¹⁰⁵Hasil Wawancara Penulis Pada Tanggal 4 April 2013

¹⁰⁶Hasil Wawancara Penulis Pada Tanggal 4 April 2013

¹⁰⁷Bukti Keterkaitan dengan Ikwanul Muslimin Terlampir

¹⁰⁸Hasil Wawancara Penulis Pada Tanggal 4 April 2013

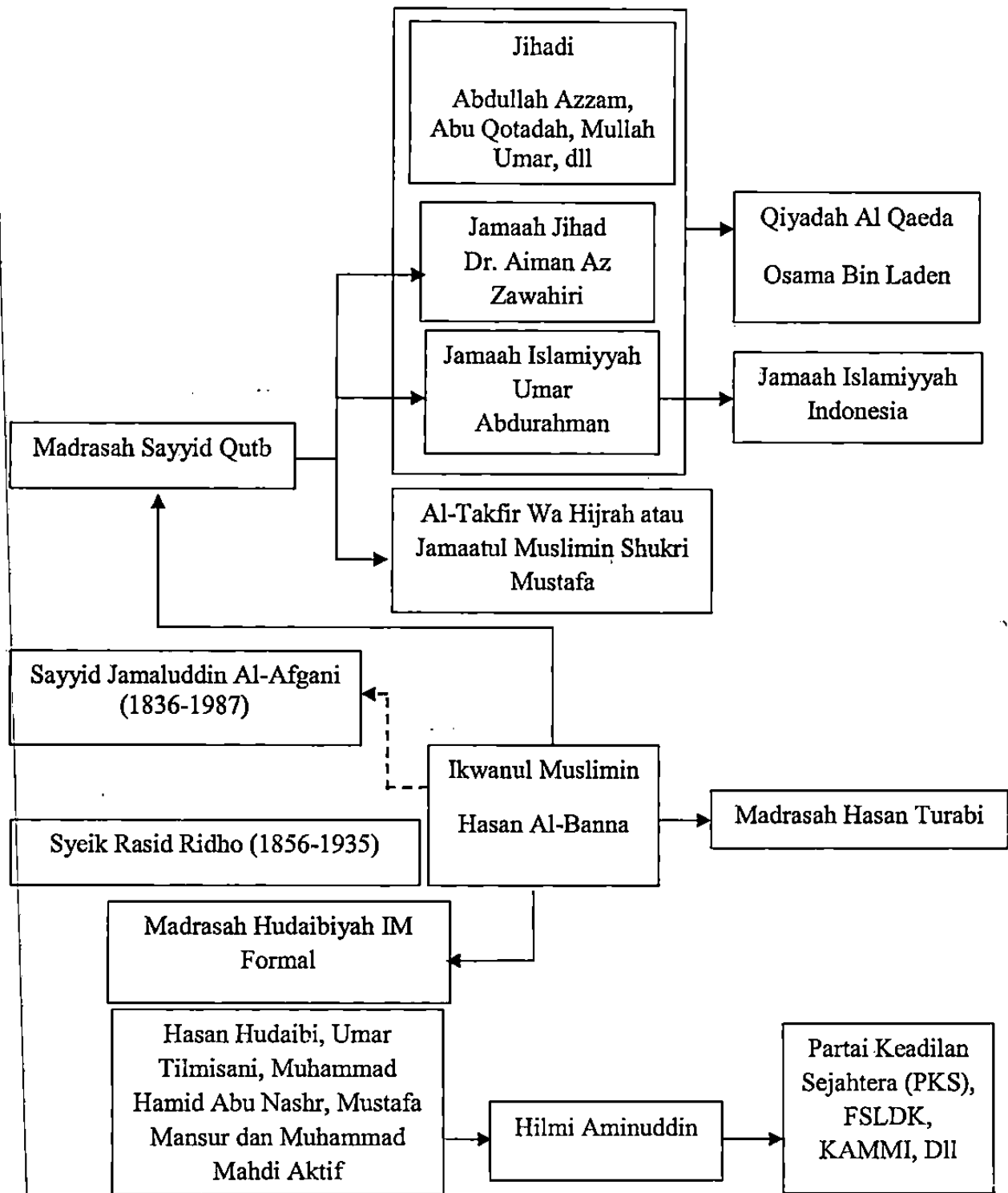
prihal kepemimpinan global, sistem kaderisasi (pendidikan), sistem organisasi, metode dakwah hingga agenda besar yang diusung oleh partai guna mewujudkan Daulah Islamiyyah, walaupun kemudian agenda ini diendapkan atas dasar perluasan ceruk pasar pemilih dengan tujuan agar tidak hanya terpaku pada golongan islam fundamentalis yang secara kuantitas sangat sedikit jumlahnya. Untuk lebih memperjelas hal tersebut, mari kita simak di bawah ini:

Tabel 2.1 Sekilas Tentang Gerakan Ikhwanul Muslimin

Pemimpin Global	Sistem Organisasi	Sistem Rekrutmen	Metode Dakwah	Agenda	Pusat Jaringan
Mahdi Aktif (Mursyid Ketujuh)	Gabungan organisasi modern dan sistem sel	Usrah dan sistem sel	Membentuk jamaah melalui halaqah dan pendidikan serta membentuk partai politik	Daulah Islamiyyah	Mesir

Selain dari pada itu, keterkaitan antara Ikhwanul Muslimun dengan PKS yang merupakan metamorphosis dari Jamaah Ikwatul Muslimin Indonesia ini dapat terlihat secara gamlang ketika kita melihat alur ideologisasi yang dibawa oleh Hilmi Aminuddin pada saat beliau melanjutkan studi ke Arab Saudi yang berbekal restu dari pemerintahan Soeharto atas saran dari Ali Moertopo. Berikut ini merupakan ilustrasi keterkaitan ideologis dan organisatoris antara gerakan Ikhwanul Muslimun di Mesir dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dimotori oleh Hilmi Aminuddin bin Danu Muhammad Hasan sebagai agen intelektual dibalik keterkaitan tersebut

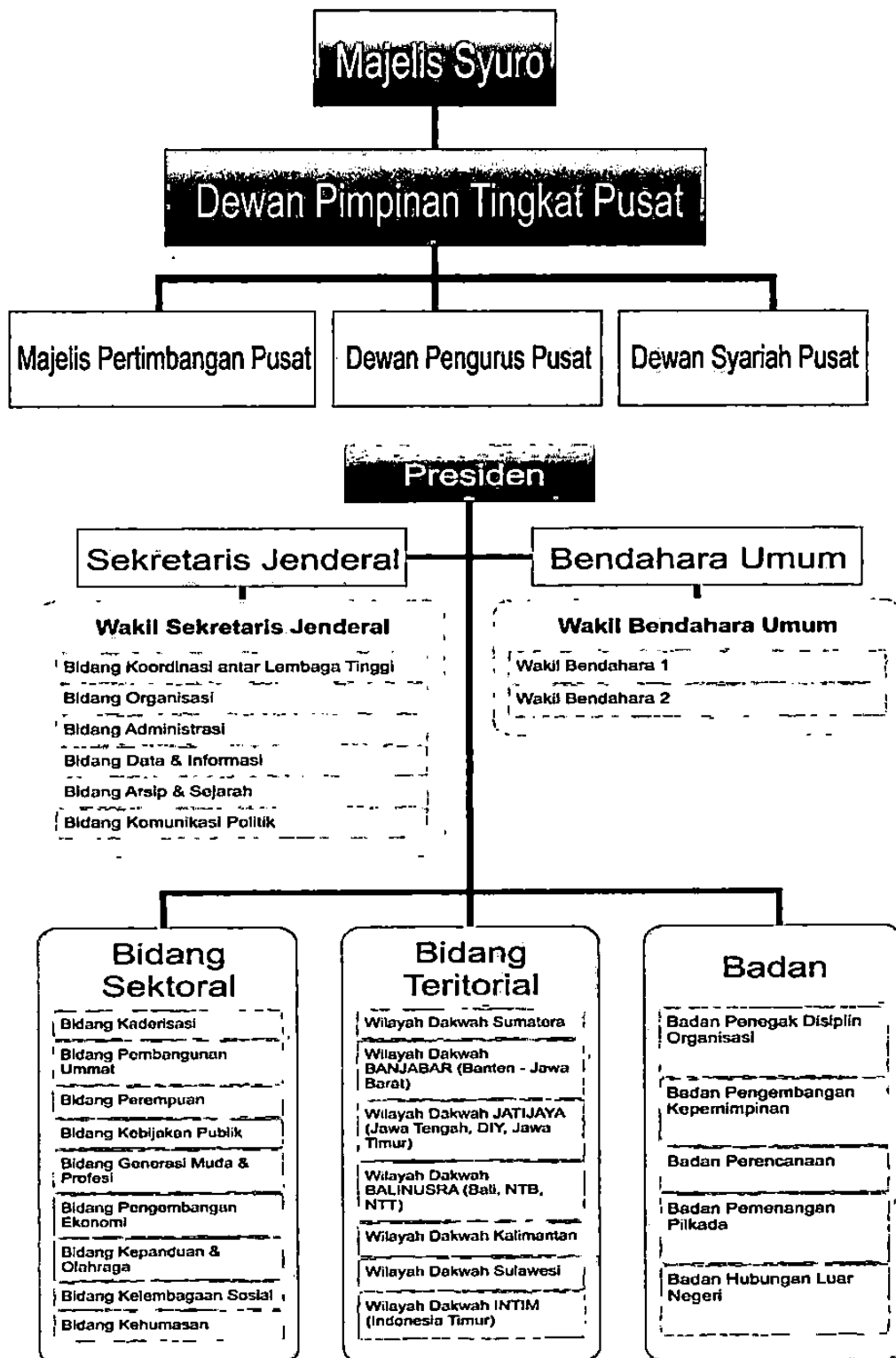
Gambar 2.1 Keterkaitan Ideologis dan Organisatoris Antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir¹⁰⁹



¹⁰⁹ M. Hudaib, "The Role of the Ikhwanul Muslimin in the Formation of the PKS in Indonesia", in "The Islamic Revival in Indonesia: A Study of the Ikhwanul Muslimin", 2007, p. 171.

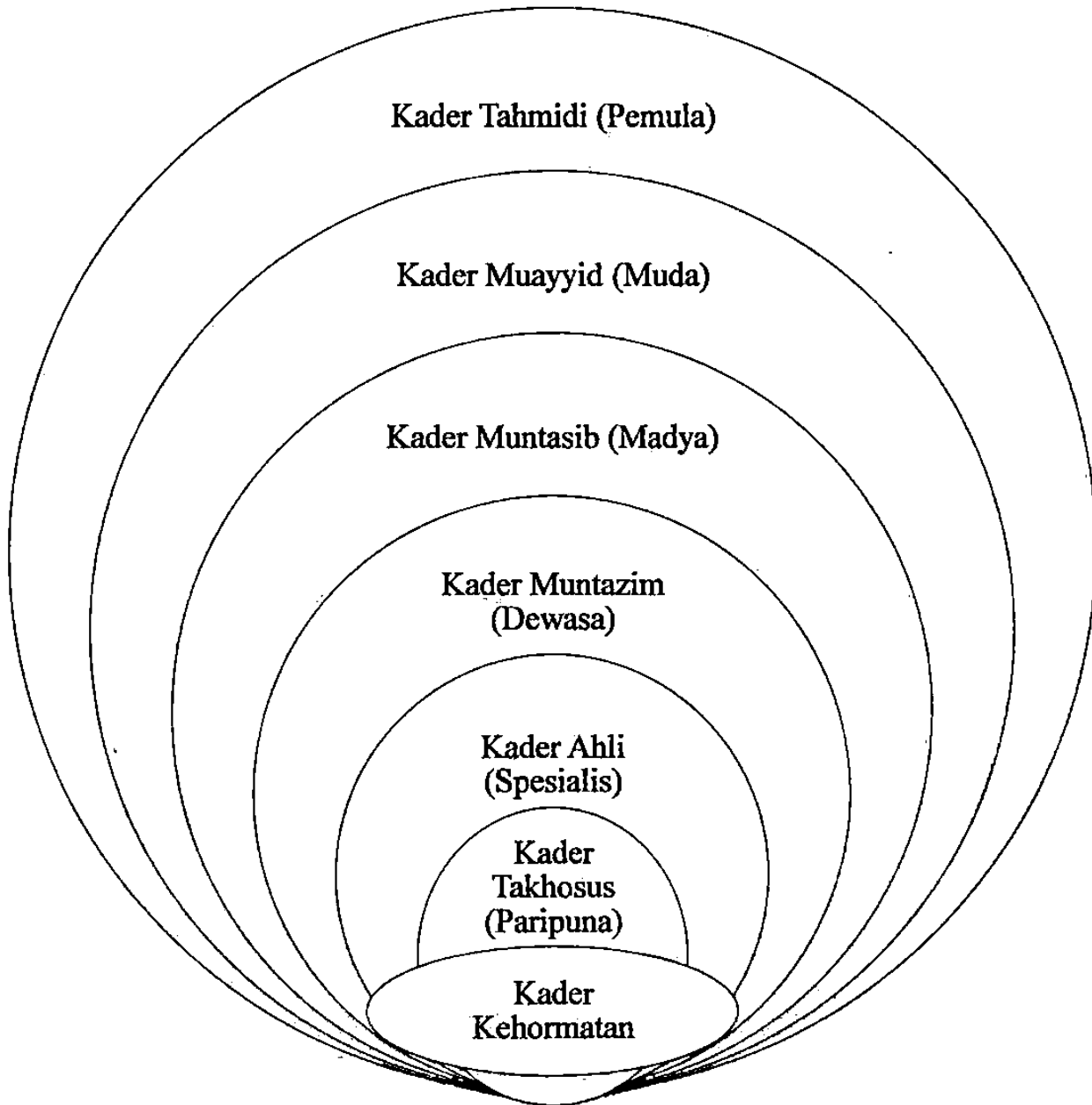
2. Struktur Organisasi Partai Keadilan Sejahtera¹¹⁰.

Gambar 2.2



3. Sistem Jenjang Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera¹¹¹.

Gambar 2.3



4. Sekilas Platform Partai Keadilan Sejahtera

Berikut ini adalah kerangka landasan yang menjadi dasar bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam melangkah di dalam dunia politik, sebagaimana dituangkan dalam dokumen-dokumen partai.

A. Asas

Asas Partai Keadilan Sejahtera adalah Islam¹¹².

B. Tujuan

Partai Keadilan Sejahtera adalah Partai Da'wah yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridloi *Allah Subhanahu Wata'ala*, dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila¹¹³.

Dengan demikian, maka arah pembangunan Indonesia yang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) cita-citakan adalah terbentuknya masyarakat yang menjadikan nilai-nilai "tauhid" sebagai landasan tata kehidupan mereka. Di dalamnya terisi dengan "individu-individu" yang bebas dari sikap menzalimi diri sendiri. Berkumpul dalam "keluarga" yang egaliter yang menjadi basis internalisasi dan ideologisasi nilai-nilai kebaikan dan keimanan. Di antara kaum "laki-laki dan perempuan" terikat dalam relasi yang proporsional saling melengkapi dalam rangka merealisasikan "amanah" penciptaan manusia. Hak-hak "masyarakat" terdistribusi secara proporsional hingga

terbangun kesederajatan sosial dan kehidupan yang tentram dan dinamis menuju terbentuknya masyarakat madani. Manusia Indonesia hidup dalam tatanan “kekuasaan” yang demokratis, berjalan dalam koridor hukum dan agama, dan rakyat memperoleh hak-hak politiknya secara penuh.

Di sana tegak persamaan hak dihadapan “hukum” bagi setiap orang dengan prosedur dan mekanisme yudisial yang berkeadilan. Mereka berusaha dalam sistem “ekonomi” egaliter, sebagai cermin dari ekonomi yang berkeadilan, yang memungkinkan perilaku ekonomi yang adil dan memberikan akses yang sama pada seluruh rakyat sehingga kekayaan tidak menumpuk hanya pada segelintir orang yang memicu jurang kesenjangan. Dimana pemanfaatan dan pengendalian ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) secara etis sebagai modal dasar pembangunan peradaban untuk kesejahteraan manusia Indonesia dan kemandirian bangsa. Warna-warni kehidupan mencerminkan pluralitas “kebudayaan” sebagai entitas yang berinteraksi secara harmonis menuju kemajuan peradaban. Individu dan masyarakat mendapat “pendidikan” yang integratif untuk membangun manusia yang mampu merealisasikan “amanah” penciptaannya menuju kehidupan sejahtera dan kemajuan bangsa¹¹⁴.

C. Usaha

Untuk mencapai tujuan tersebut diusahakan hal-hal sebagai berikut :

1. Membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk kezaliman

¹¹⁴Lihat Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera “*Memperjuangkan Masyarakat Madani, Etika dan Perilaku dan Platform Kebijakan PK Sejahtera*” Tidak diterbitkan, 2002 II-1-24

2. Membina masyarakat Indonesia agar mampu menjawab berbagai problema dan tuntutan masa mendatang
3. Membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai islam.
4. Membangun negara Indonesia baru yang adil, sejahtera dan berwibawa¹¹⁵.

D. Sasaran

Untuk mencapai tujuan partai dirumuskan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemerintahan yang jujur, bersih berwibawa, dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan
2. Tegaknya masyarakat islam yang memiliki kemandirian berdasarkan sebuah konstitusi yang menjamin hak-hak rakyat dan bangsa Indonesia.

Sasaran partai ini diupayakan dalam bingkai kebijakan dasar periodik dan agenda Nasional Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Rumah Tangga partai¹¹⁶.

E. Sarana dan Prasarana

Dalam mewujudkan tujuan dan sarannya partai menggunakan cara, sarana dan prasarana yang tidak bertentangan dengan norma-norma hukum dan kemaslahatan umum, antara lain:

¹¹⁵Lihat Tim Litbang Kompas "Partai-Partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program 2004-2009", PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2004 Hal 305

¹¹⁶Lihat Tim Litbang Kompas "Partai-Partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program 2004

1. Seluruh sarana dan manajemen politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek yang dapat mengarahkan dan mengatur kehidupan masyarakat serta dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahannya.
2. Ikut serta dalam lembaga-lembaga pemerintahan, badan-badan penentu kebijakan, hukum dan perundang-perundangan, lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya.
3. Menggalakan dialog konststruktif disertai argumentasi yang kuat dengan semua kekuatan politik dan sosial.
4. Aktif berpartisipasi dalam berbagai lembaga dan organisasi yang sesuai dengan tujuan partai¹¹⁷.

F. Visi

Visi yang dicita-citakan Partai Keadilan Sejahtera adalah:

“Terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat”.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Masyarakat madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan: menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong-royong menjaga kedaulatan negara. Pengertian *genuine* dari masyarakat madani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat indonesia dimana *ukhuwwah islamiyyah*

¹¹⁷ Lihat: (Tika) Tika, Lita, Kencana “Partai Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004

(ikatan keislaman), *ukhuwwah wathaniyyah* (ikatan kebangsaan) dan *ukhuwwah Basyariyyah* (ikatan kemanusiaan), dalam bingkai NKRI.

Adil adalah kondisi dimana entitas dan kualitas kehidupan-baik pembangunan politik, ekonomi, hukum dan sosial kemasyarakatan- ditempatkan secara proposional dalam ukuran yang pas dan seimbang, tidak melewati batas. Yakni sikap moderat, suatu keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrem: mengurangi dan melebihi (*tafrith* dan *ifrath*).

Sejahtera mengarahkan pembangunan pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin manusia, agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai hamba dan khilafah Allah, yakni keseimbangan antara kebutuhan dan sumber pemenuhannya. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan (*tawazun*) hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya (ruh, akal dan jasad).

Bermartabat secara individual dan sosial menuntut bangsa Indonesia untuk menempatkan dirinya sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mampu menampilkan dirinya, baik dalam aspek sosial, politik, maupun budaya secara elegan, sehingga memunculkan penghormatan dan kekaguman dari bangsa lain. Martabat muncul dari akhlak dan budi pekerti yang baik, mentalitas, etos kerja dan akhirnya bermuara pada integritas kepribadian dan

Partai keadilan sejahtera mencitakan Indonesia menjadi negara kuat yang membawa misi rahmat keadilan bagi segenap umat manusia, agar bangsanya menjadi kontributor peradaban manusia dan buminya menjelma menjadi taman kehidupan yang tentram dan damai¹¹⁸.

G. Misi

Misi yang diemban Partai Keadilan Sejahtera adalah:

1. Mempelopori reformasi politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas. Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskan pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif.

¹¹⁸Lihat 'Op cit Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera "Memperjuangkan Masyarakat

Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industri pertahanan nasional. Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Menegaskan kembali sikap bebas aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas sunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.

2. Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan; peningkatan daya saing industri nasional dengan pendalaman struktur dan *upgrading* kemampuan teknologi; dan pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis *resources* dan *knowledge*. Semua itu dilaksanakan di atas landasan (filosofi) ekonomi egaliter yang akan menjamin kesetaraan atau evaluasi yang sederajat antara (pemilik) modal dan (pelaku) usaha, dan menjamin pembatasan tindakan spekulasi,

penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya bagi seluruh pelaku usaha.

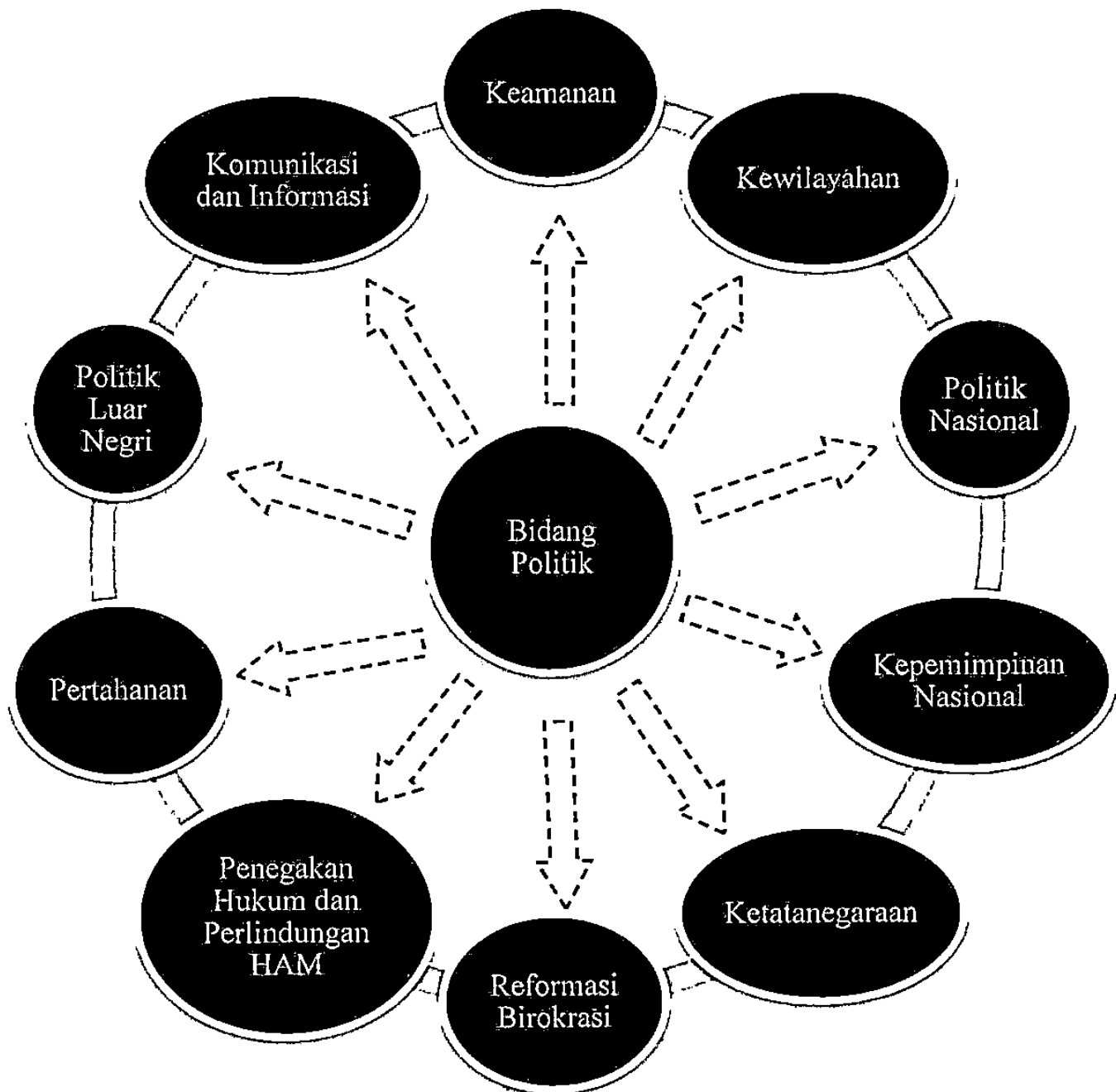
3. Menuju pendidikan berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya saing tinggi serta guru profesional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua, dengan visi sehat badan, mental spiritual dan sosial sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT. Untuk membangun bangsa dan negara; dengan mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan religius sebagai faktor penentu dalam membangun karakter bangsa yang tangguh, berdisiplin kuat, ber-etos kerja kokoh, serta berdaya inovasi dan kreatifitas tinggi. Terciptanya masyarakat sejahtera, melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat mewisuda dan membantu proses pembangunan yang kontinyu¹¹⁹.

¹¹⁹Lihat 'Ibid Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera "Memperjuangkan Masyarakat Melalui Falsafah, Program dan Platform Kebijakan PK Sejahtera" Hal 24

H. Isu-isu Strategis Sektoral¹²⁰

1. Bidang Politik¹²¹

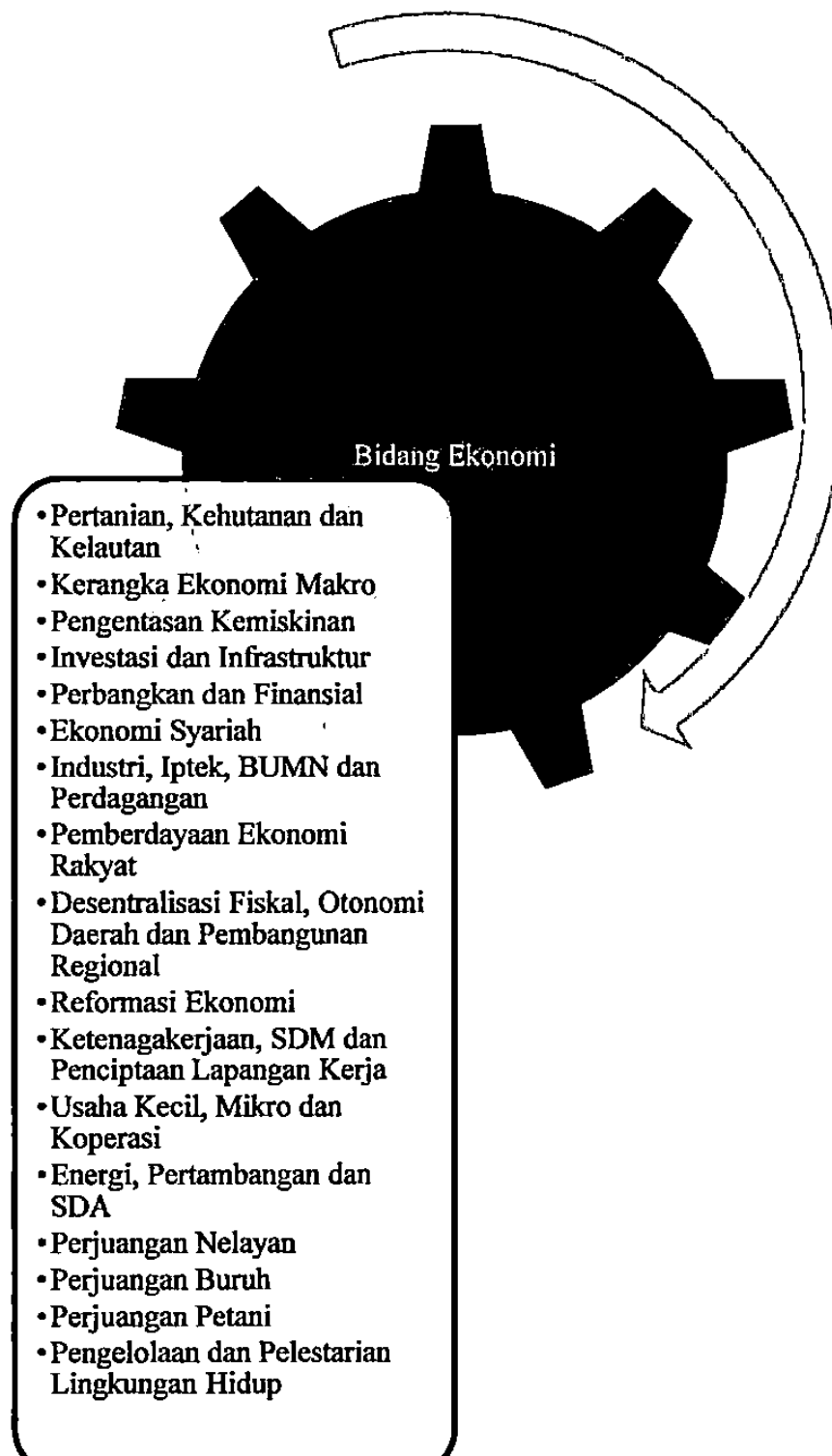
Gambar 2.4



¹²⁰Lihat 'Ibid Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera "Memperjuangkan Masyarakat

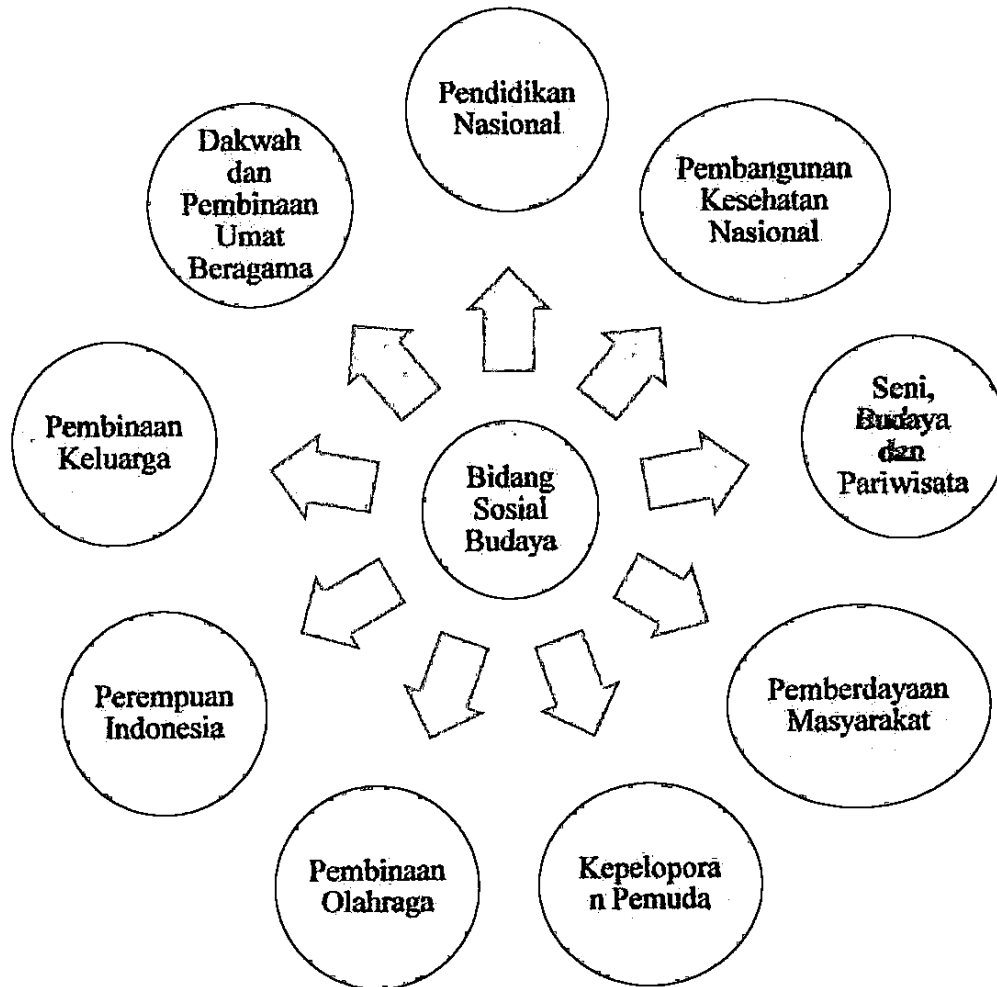
2. Bidang Ekonomi¹²².

Gambar 2.5



3. Bidang Sosial Budaya¹²³

Gambar 2.6



¹²³ Penjelasan Terlampir

B. Pemilihan Umum Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera

Pasca runtuhnya rezim Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, rakyat Indonesia menuntut kepada pemerintah yang saat itu dipegang oleh Habibie guna mempercepat penyelenggaraan pemilihan umum yang semula dijadwalkan pada tahun 2002, tuntutan tersebut adalah buah dari kekecewaan masyarakat akan krisis yang sedang melanda bangsa ini, dari mulai krisis ekonomi, sosial hingga krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. melihat tuntutan masyarakat ini, Habibie kemudian menyiapkan perangkat hukum guna menyelenggarakan pemilihan umum, adapun hasilnya sebagai berikut:

1. Anotasi Pemilihan Umum Partai Keadilan Pada Tahun 1999

a. Sistem Pemilu.

Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pada masa reformasi. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sistem pemilu 1999 sama dengan pemilu 1997, yaitu sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.

b. Asas Pemilu

Pemilu 1999 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

c. Dasar Hukum

1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

2	Golkar	23.741.749	120	120
3	PPP	11.329.905	58	59
4	PKB	13.336.982	51	51
5	PAN	7.528.956	34	35
6	PBB	2.049.708	13	13
7	Partai Keadilan	1.436.565	7	6

Sebagai pemenangnya adalah PDI-P yang meraih 35.689.073 suara atau 33,76 persen dengan perolehan 153 kursi. Golkar memperoleh 23.741.749 suara atau 22,46 persen, sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi dibanding pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,62 persen, mendapatkan 51 kursi. PPP dengan 11.329.905 suara atau 10,72 persen, mendapatkan 58 kursi atau kehilangan 31 kursi dibanding pemilu 1997. PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 persen, mendapat 34 kursi. PBB dengan 2.049.708 suara atau 1,94 persen, mendapat 13 kursi dan Partai Keadilan (PK) meraih 1.436.565 suara atau 1,36 persen, mendapat 7 kursi.

Tabel 2.4 Perolehan Jumlah Perolehan Suara Partai Keadilan dan Partai-Partai

Berbasis "Masa Lalu" dalam Pemilu 1999¹²⁷, yaitu sebagai berikut:

No	No Partai	Nama Partai	Jumlah Suara	%
1	24	Partai Keadilan	1.436.565	1,36

¹²⁷ Lihat (Ongki Ali Said Damayanti "Evolusi Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan

2	21	PPII Masyumi	456.718	0,43
3	10	PSII	375.920	0,36
4	27	IPKI	328.565	0,31
5	8	Masyumi Baru	152.589	0,14
6	31	MURBA	62.006	0,06

Tabel 2.5 Perbandingan Perolehan Suara Partai Keadilan dengan Partai-Partai Lain Yang Mempunyai “Tokoh yang dapat dijual” dalam Pemilu 1999¹²⁸

No	No Partai	Nama Partai	Jumlah Suara	%
1	24	Partai Keadilan	1.436.565	1,36
2	36	PUDI	140.980	0,62
3	39	PDR	427.854	0,40
4	6	PUI	269.309	0,25
5	16	PRD	78.730	0,07

2. Anotasi Pemilihan Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada tahun 2004.

Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih

¹²⁸ Lihat: Ibid. Ali Said Damanik “Evolusi Partai Keadilan Transformasi 20 Tahun Gerakan

langsung Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 Anggota DPR, 128 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-2009. Sedangkan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk masa bakti 2004-2009 diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September (putaran II).

a. Sistem Pemilu

Pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD (termasuk di dalamnya DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Partai politik akan mendapatkan kursi sejumlah suara sah yang diperolehnya. Perolehan kursi ini akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau melebihi nilai BPP, apabila tidak ada, maka kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut. Pemilu untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

b. Asas Pemilu

Pemilu 2004 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

c. Dasar Hukum

1). Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden¹²⁹.

d. Pemilihan Umum Anggota DPD Pada Tahun 2004.

Pemilu anggota DPD juga dilaksanakan bersamaan dengan pemilu anggota DPR, yaitu pada tanggal 5 april 2004. Pemilu anggota DPD tahun 2004 yang memilih 4 wakil masing-masing dari 32 Provinsi menghasilkan 128 anggota DPD.

Tabel 2.6 Aneka Asas Parpol Peserta Pemilu 2004¹³⁰ adalah sebagai berikut:

No	Asas Parpol	Jumlah	Nama Parpol
1	Pancasila tanpa embel-embel	13 Parpol	PAN, PPDK, PKPI, Demokrat, PPDI, PKPB, PKB, PDI-P, PDS, Golkar, PSI, Patriot Pancasila, PPD dan Pelopor
2	Pancasila dan UUD 1945	1 Parpol	PBSD
3	Pancasila berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong	1 Parpol	Partai Merdeka

¹²⁹Lihat 'Opcit Tim Penyusun "Pemilu Untuk Pemula" Hal 12-13

¹³⁰Tim Penyusun "Pemilu Untuk Pemula" Hal 12-13

4	Keadilan, Demokrasi dan Pancasila Islam	1 Parpol	PPIB
5	Islam	5 Parpol	PBB, PPP, PPNUI, PKS dan PBR
6	Marhaenisme ajaran Bung Karno	2 Parpol	PNI Marhaenisme dan PNBK

Tabel 2.7 Konfigurasi Perolehan Suara dan Kursi DPR-RI Hasil Pemilu 5 April 2004¹³¹ (Berdasarkan 7 Partai Terbesar) adalah sebagai berikut:

No	Parpol Peserta Pemilu	Perolehan Suara	%	Perolehan Kursi DPR (Sebelum Putusan MK)	Perolehan Kursi DPR (Pasca Putusan MK)
1	Golkar	24.480.757	21,58	128	128
2	PDI-P	21.026.629	18,53	109	109
3	PKB	11.989.564	10,57	52	52
4	PPP	9.248.764	8,15	58	58
5	Partai Demokrat	8.455.225	7,45	57	55
6	PKS	8.325.020	7,34	45	45
7	PAN	7.303.324	6,44	52	53

¹³¹ Lihat 'Mud Iqbal Jomanto' dkk. "Pemilihan Presiden, Sensus Lapangan 2004: Dokumentasi Analisis

Tabel 2.8 Partai Dengan Pemilih Terbanyak Perbandingan Tahun 1999 dan 2004¹³²

(Jumlah Suara Populer dan Presentase Berdasarkan 7 Partai Terbesar), adalah sebagai berikut:

Pemilu 1999			Urut	Pemilu 2004		
Partai Politik	Hasil			Partai Politik	Hasil	
	Suara	%			Suara	%
PDI-P	35.689.073	33,76	1	Golkar	24.480.757	21,58
Golkar	23.741.749	22,46	2	PDI-P	21.026.629	18,53
PKB	13.336.982	12,62	3	PKB	11.989.564	10,57
PPP	11.329.905	10,72	4	PPP	9.248.764	8,15
PAN	7.528.956	7,12	5	Demokrat	8.455.225	7,45
PBB	2.049.708	1,94	6	PKS	8.325.020	7,34
PK	1.436.585	1,36	7	PAN	7.303.324	6,44

3. Anotasi Pemilihan Umum Partai Keadilan Sejahtera Pada Tahun 2009

Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih 560 Anggota DPR, 132 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun

¹³² lihat: Ibid. Jm. Jemanto, dkk. "Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004. Dokumentasi Analisis

DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014 diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 (satu putaran).

a. Sistem Pemilu

Pemilu 2009 untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Kursi yang dimenangkan setiap partai politik mencerminkan proporsi total suara yang didapat setiap parpol. Mekanisme system ini memberikan peran besar kepada pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan. Calon terpilih adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak. Distrik disini adalah Provinsi dimana setiap Provinsi memiliki 4 (empat) perwakilan.

b. Asas Pemilu

Pemilu 2009 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

c. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- 3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR

4) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden¹³³.

d. Pemilu Anggota DPD 2009

Pemilu anggota DPD juga dilaksanakan bersamaan dengan pemilu DPR, yaitu pada tanggal 2009. Pemilu anggota DPD tahun 2009 yang memilih 4 wakil masing-masing dari 33 Provinsi menghasilkan 132 anggota DPD¹³⁴.

Tabel 2.9 Partai yang Lolos Parliamentary Threshold¹³⁵ diantaranya sebagai berikut:

No	No Partai	Nama Partai	Jumlah Suara	Persentase Suara	Jumlah Kursi	% Kursi	Status Parliamentary Threshold (PT)
1	31	Demokrat	21.703.137	20,85	150	26,79	Lolos
2	23	Golkar	15.037.757	14,45	107	19,11	Lolos
3	28	PDI-P	14.600.091	14,03	95	16,96	Lolos
4	8	PKS	8.206.955	7,88	57	10,18	Lolos
5	9	PAN	6.254.580	6,01	43	7,68	Lolos
6	24	PPP	5.533.214	5,32	37	6,61	Lolos
7	13	PKB	5.146.122	4,94	27	4,82	Lolos
8	5	Gerindra	4.646.406	4,46	26	4,64	Lolos
9	1	Hanura	3.922.870	3,77	18	3,21	Lolos

¹³³Lihat 'Opcit Tim Penyusun "Pemilu Untuk Pemula" Hal 14-15

¹³⁴Lihat 'Ibid Tim Penyusun "Pemilu Untuk Pemula" Hal 46

¹³⁵Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Parlementer_Indonesia_2009 yang diakses pada

Pada pemilu 2009 yang lalu, perolehan suara partai-partai islam secara umum merosot drastis. Hanya 4 partai islam yang lolos ambang batas parlementer dengan total suara kurang lebih 25 persen, yaitu PKS, PAN, PKB, dan PPP. Dominasi partai-partai nasionalis sudah terdeteksi jauh sebelum pemilu 2009. Performa dua partai nasionalis pemenang pemilu 1999 dan 2004, yakni PDI Perjuangan dan Golkar memang menurun juga. Namun, penurunan mereka direbut Partai Demokrat dan dua partai nasionalis baru seperti Gerindra dan Hanura, bukan diambil partai-partai islam.

Dengan demikian, penurunan suara islam bukan lagi diambil oleh partai islam yang lain karena partai-partai islam lainnya juga mengalami degradasi elektoral. Fakta anjloknya suara partai islam pada 2009 menunjukkan makin kurang relevannya penjelasan politik aliran untuk melihat perilaku pemilih di Indonesia. Padahal, data longitudinal Lembaga Survei Indonesia (LSI) sejak 2003 hingga sekarang, juga survei Merston Ohio State University dan UI (1999) dan PPIM (2001 dan 2002) menunjukkan meningkatnya ketaatan muslim Indonesia. Artinya secara sosiologis telah terjadi peningkatan religius masyarakat, namun tidak berdampak secara elektoral terhadap peningkatan suara partai islam.

Menarik untuk dicermati hasil *exit poll* Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada pemilu 2009 yang lalu. Meski PAN dan PKB sejak awal berdirinya telah mendeklarasikan diri sebagai partai terbuka yang plural, tetap saja sebagian besar pemilih mereka datang dari kalangan muslim. Pemilih Kristen/Katolik paling banyak memilih PDI Perjuangan, Golkar dan Demokrat. Partai-partai nasionalis

berhasil mengambil sebagian besar pemilih muslim. PKS masih bertumpu pada pemilih muslim. Namun strategi PKS di pemilu 2009 yang mencitrakan diri sebagai partai terbuka mulai menampakan hasil yang baik¹³⁶.

Tabel 2.10 Hasil Exit Poll LSI Berdasarkan Agama¹³⁷, yaitu sebagai berikut:

	Hanura	Gerindra	PKS	PAN	PKB	Golkar	PPP	PDIP	Demokrat	Lainnya	
Islam	4,1	4,4	9,0	6,7	5,6	14,6	6,0	12,7	21,4	15,6	100
Kristen/ Protestan	1,8	5,9	0,8	0,5	0,3	12,1	0,5	21,3	18,5	38,3	100
Lainnya	2,4	1,2	1,2	2,4	1,2	19,0	1,2	39,3	15,5	16,7	100
	3,8	4,4	7,9	5,9	5,0	14,5	5,3	14,3	20,9	18,1	100

Tabel di bawah menunjukkan bahwa daya tarik PKS terhadap pemilih perempuan kurang lebih sama terhadap pemilih laki-laki. Pendukung PDI Perjuangan lebih banyak datang dari pemilih laki-laki, meskipun partai ini dipimpin seorang perempuan. Secara umum, tidak ada perbedaan signifikan antara basis pemilih berdasarkan gender, kecuali pemilih PDI Perjuangan yang lebih banyak laki-laki. Pada pemilu 2009, partai demokrat sedikit lebih kuat menarik pemilih perempuan dibanding pemilih laki-laki.

¹³⁶Lihat 'Opic Burhanuddin Muhtadi "Dilema PKS Suara dan Syariah" Hal 205-206

¹³⁷Lihat 'Opic Burhanuddin Muhtadi "Dilema PKS Suara dan Syariah" Hal 1208

Tabel 2.11 Hasil Exit Poll LSI Berdasarkan Gender¹³⁸ adalah sebagai berikut:

	Hanura	Gerindra	PKS	PAN	PKB	Golkar	PPP	PDIP	Demokrat	Lainnya	
Laki-laki	4,1	4,8	7,7	6,0	5,1	14,4	5,0	15,3	20,5	17,1	100
Perempuan	3,5	4,1	8,0	5,9	4,8	14,5	5,4	13,3	21,4	19,0	100
	3,8	4,4	7,9	6,0	5,0	14,5	5,2	14,3	20,9	18,1	100

Dilihat dari domisili desa/kota, penetrasi elektoral PKS jauh lebih kuat dikalangan pemilih yang tinggal di perkotaan ketimbang di desa. Namun pemilih desa yang memilih PKS pada pemilu 2009 mulai bertambah. Demikian pula dengan Partai Demokrat yang lebih banyak dipilih oleh pemilih dari perkotaan. Sejak awal berdirinya partai, basis partai ini memang perkotaan. Namun Demokrat berhasil meluaskan pangsa pasar pemilih di desa pada pemilu 2009. PAN mulai dilirik pemilih dari pedesaan. Namun pemilih PAN di kota makin merosot jumlahnya. Pemilih Golkar, PDI Perjuangan dan PPP lebih banyak berasal dari pedesaan ketimbang perkotaan.

Tabel 2.12 Hasil Exit Poll LSI Berdasarkan Domisili Desa/Kota¹³⁹, yaitu:

	Hanura	Gerindra	PKS	PAN	PKB	Golkar	PPP	PDIP	Demokrat	Lainnya	
Pedesaan	3,7	4,5	6,7	6,3	5,4	15,3	5,6	15,5	18,1	18,8	100
Perkotaan	4,1	4,3	10,9	4,9	3,7	12,2	4,3	11,1	18,3	16,1	100
	3,8	4,4	7,9	5,9	5,0	14,5	5,2	14,3	20,9	18,1	100

¹³⁸Lihat 'Ibid Burhanuddin Muhtadi "Dilema PKS Suara dan Syariah" Hal 209

¹³⁹Lihat Burhanuddin Muhtadi "Dilema PKS Suara dan Syariah" Hal 209

Dilihat dari tingkat pendidikan, magnet elektoral PKS jauh lebih kuat di kalangan pemilih yang berpendidikan menengah ke atas. Demikian lebih berhasil meningkatkan elektabilitasnya di kalangan kelas menengah ke bawah ketimbang PKS. Pemilih PAN dari kelas menengah ke bawah cenderung meningkat, tapi kelas menengah ke atas malah menurun sebaliknya, pemilih PDI Perjuangan, PKB dan PPP lebih banyak datang dari pemilih yang berlatar belakang pendidikan rendah.

Tabel 2.13 Hasil Exit Poll LSI Berdasarkan Tingkat Pendidikan¹⁴⁰, yaitu sebagai berikut:

	Hanura	Gerindra	PKS	PAN	PKB	Golkar	PPP	PDIP	Demokrat	Lainnya	
← SD	4,4	4,6	4,8	6,5	5,8	14,4	5,8	17,1	16,0	20,6	100
SLTP	3,7	3,8	6,6	4,5	5,0	15,6	6,9	14,4	20,6	18,9	100
SLTA	3,6	4,7	9,6	6,1	4,2	13,3	3,9	13,0	25,8	15,7	100
Kuliah	1,7	3,7	18,3	6,6	3,7	15,8	3,4	5,7	27,8	13,2	100
	3,8	4,4	7,9	5,9	5,0	14,5	5,3	14,3	21,0	18,1	100

Tingkat pendidikan memiliki korelasi positif dengan tingkat pendapatan. Biasanya semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pendapatannya. Dengan demikian pula dengan profil pemilih PKS dari sisi pendapatan. Karena tingkat pendidikan pemilih PKS baik, dilihat dari sisi pendapatan pemilih PKS juga relatif baik dibanding pemilih partai-partai lain. Profil yang sama juga terlihat pada

¹⁴⁰ lihat Ghid Dhuhandia Mubtadi "Dilema PKS Sman dan Smanik" Hal 210

pemilih partai Demokrat. Pemilih PDI Perjuangan lebih banyak datang dari kelompok dengan tingkat pendapatan di bawah Rp 400 ribu perbulan.

Tabel 2.14 Hasil Exit Poll LSI Berdasarkan Tingkat Pendapatan¹⁴¹, yaitu sebagai berikut:

	Hanura	Gerindra	PKS	PAN	PKB	Golkar	PPP	PDIP	Demokrat	Lainnya	
400 ribu	4,8	3,5	5,4	5,2	5,4	15,1	6,4	16,4	15,6	22,1	100
400- □1 Jt	3,1	4,6	5,7	7,2	5,6	13,9	5,3	15,0	20,6	18,9	100
□1 Juta	3,1	5,1	12,5	5,2	3,5	14,5	4,3	10,9	27,6	13,3	100
	3,7	4,4	7,8	5,9	4,9	14,5	5,4	14,2	21,1	18,2	100

Pada tabel di bawah, secara elektoral PKS lebih kompetitif dikalangan pemilih dengan latar belakang etnis Betawi dan Sunda. PAN gagal mendapatkan dukungan dari pemilih etnis Jawa dan Sunda yang notabene populasinya paling besar. Namun PAN mulai disukai pemilih Bugis. Partai Demokrat berhasil mendapatkan dukungan dari pemilih lintas suku. PDI Perjuangan hanya kompetitif di kalangan pemilih Jawa dan Sunda, tapi kurang menarik bagi pemilih dari suku-suku luar Jawa. Sebaliknya, pemilih Golkar relatif kuat dari suku-suku non-Jawa, tapi kalah bersaing dengan Demokrat dan PDI Perjuangan dalam memperebutkan pemilih Jawa.

Tabel 2.15 Hasil Exit Poll LSI Berdasarkan Afiliasi Suku¹⁴², yaitu sebagai berikut:

	Hanura	Gerindra	PKS	PAN	PKB	Golkar	PPP	PDIP	Demokrat	Lainnya	
Jawa	3,8	4,9	7,3	6,4	7,8	13,5	4,4	17,9	20,3	13,7	100
Sunda	3,9	3,4	11,4	5,4	1,3	17,8	8,0	14,0	25,2	9,5	100
Melayu	4,1	5,9	8,3	7,1	3,0	18,3	5,9	7,1	16,6	23,7	100
Madura	3,8	1,9	3,8	3,8	20,2	6,7	12,5	6,7	14,4	26,0	100
Bugis	8,3	0,8	4,2	14,2	---	24,2	6,7	3,3	18,3	20,0	100
Betawi	1,2	4,7	24,7	7,1	5,9	11,8	5,9	10,6	25,9	2,4	100
Lainnya	3,2	4,6	6,2	4,6	1,8	13,3	4,0	12,5	20,9	28,8	100
	3,7	4,4	7,8	5,9	4,9	14,5	5,4	14,2	21,1	18,2	100

¹⁴² Lihat Ibid Nurhasanuddin Mubtadi "Dilema PKS Sunda dan Surabaja" Hal 211